



# Pelestarian Budaya DIY Raih Penghargaan

● WAHYU SURYANA

## DIY borong penghargaan Kekayaan Intelektual Komunal.

YOGYAKARTA — DIY kembali memborong penghargaan atas Kekayaan Intelektual Komunal (KIK). Hebatnya, tidak cuma Pemda DIY, penghargaan diraih semua Pemkab/pemkot yang ada di DIY.

Penghargaan diserahkan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly, kepada Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X. Itu diberikan atas komitmen menjaga kawasan berbudaya di DIY.

Menkumham Yasonna menuturkan, setelah mendapatkan penghargaan kekayaan intelektual pada 2013, DIY tetap layak mendapatkan penghargaan yang sama pada 2019. Apalagi, memenuhi lima kriteria.

Mulai kontinuitas dan sosialisasi, kampanye, pendaftaran kekayaan intelektual di lingkup perguruan tinggi dan pemda, keterlibatan daerah yang

mendukung kekayaan intelektual.

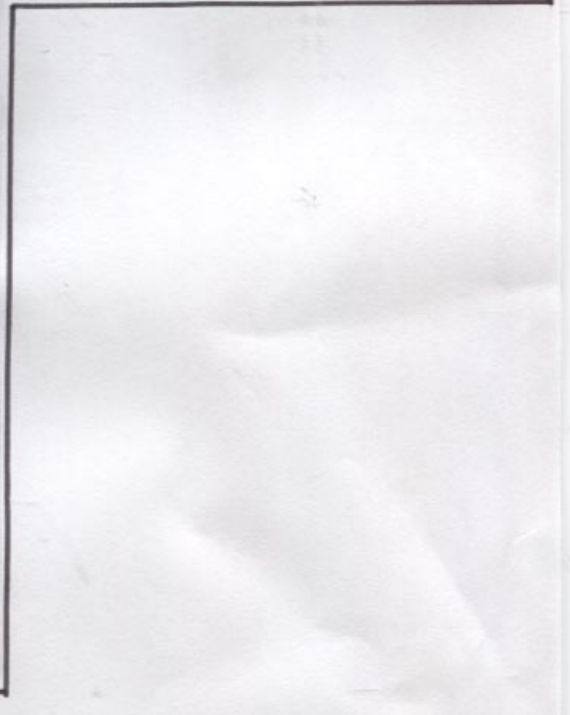
"Kemudian, upaya-upaya menindaklanjuti pelanggaran kekayaan intelektual, adanya data inventarisasi yang valid dan lengkap, serta adanya data perlindungan," ujar Yasonna, di Bangsal Kepatihan Yogyakarta, Rabu (17/7).

Setelah pemberian penghargaan, dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang ditandatangani langsung Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Yasonna Hamonangan Laoly.

Turut menyaksikan Dirjen HAM, pimpinan tinggi madya, Kakanwil Hukum HAM DIY dan Jateng, Forkopimda DIY, pimpinan tinggi pratama, dan pimpinan Pemkab dan pemkot di DIY.

Yasonna menambahkan, MoU merupakan komitmen kuat untuk memajukan dan memperkuat sistem kekayaan intelektual nasional. Ia berpesan agar DIY komitmen untuk konsisten menjaga dan mengembangkan kekayaan intelektual.

Penghargaan pertama diberikan kepada Keraton Yogyakarta atas komitmen melestarikan Sekaten. Lalu,



Puro Pakualaman mendapatkan penghargaan atas komitmen melestarikan Beksan Bondoboyo.

Pemkab Sleman menerima penghargaan atas komitmen menjaga kelangsungan Upacara Adat Bekakak. Pemkab Bantul menerima penghargaan atas komitmen menjaga kelangsungan Tari Montro.

Pemkot Yogyakarta menerima penghargaan atas komitmen menjaga tradisi Mubeng Beteng. Pemkab Gunungkidul menerima penghargaan atas komitmen menjaga kesenian Tayub Yogyakarta.

Sedangkan, Pemkab Kulonprogo menerima penghargaan atas komitmen menjaga kesenian Tari Angguk. Dalam sambutannya, Sultan menilai, HKI personal dan komunal banyak dimiliki masyarakat Yogyakarta.

Apalagi, banyak anak muda yang bergerak di industri kreatif. Karenanya, Sultan merasa, akar komunal memang sudah ada sebagai kearifan lokal dan seni tradisi.

Untuk itu, ia menekankan, penandatanganan dokumen menjadi semakin penting. Agar, lanjut Sultan, hasil inovasi dan kreasi anak-anak negeri akan lebih terlindungi dari pembaja-

kan dan pemalsuan.

"Saya berharap dalam pelaksanaannya dapat dilakukan perencanaan secara cermat dan melakukan sosialisasi secara luas, sehingga pengembangan potensi dan kreatif masyarakat mengalami kemajuan signifikan," kata Sultan.

Selain itu, Pemkab Sleman juga meraih predikat Kawasan Berbudaya Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Predikat itu diberikan Kementerian Hukum dan HAM yang ditandai pemberian piagam.

Piagam diberikan Menkumham kepada Bupati Sleman, Sri Purnomo. Selain itu, Pemkab Sleman menerima sertifikat surat kekayaan intelektual komunal.

Bupati Sleman, Sri Purnomo menuturkan, predikat yang diraih menjadi salah satu hasil yang baik. Utamanya, atas upaya-upaya yang telah dilakukan Pemkab Sleman selama ini.

"Kita juga terus mendorong masyarakat atau mereka-mereka yang memiliki ide kreatifnya untuk memperhatikan terkait HKI agar lebih aman dan terlindungi," ujar Sri.

■ ed : yusuf assidiq

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kebudayaan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005